

THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON THE EFFECTIVENESS OF ISLAMIC EDUCATION COST GOVERNANCE: A STUDY OF MTSM MUARA PANAS**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS TATA KELOLA BIAYA PENDIDIKAN ISLAM: STUDI MTSM MUARA PANAS****Ratna Julia Putri¹, Hamdi Abdul Karim²**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi^{1,2}

*ratnajuliaputri60@gmail.com, hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id

Corresponding Author*ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of transparency and accountability on the effectiveness of education cost governance in Islamic educational institutions, particularly at MTs Muhammadiyah Muara Panas. Effective financial management is a crucial factor in achieving high-quality and sustainable educational outcomes. In this context, transparency and accountability serve as fundamental principles in establishing effective, efficient, and trustworthy governance systems. This research employs a quantitative method with an associative approach. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation. The respondents consisted of teachers and administrative staff involved in school financial management. Data analysis was conducted using multiple linear regression, t-test (partial), F-test (simultaneous), and coefficient of determination (R Square). The results indicate that both accountability and transparency have a positive and significant effect on the governance of education costs. Partially, accountability shows an influence with a coefficient value of 0.104, while transparency has a greater influence with a coefficient value of 0.230. Simultaneously, both variables significantly affect the effectiveness of financial governance. The coefficient of determination value of 60.8% suggests that transparency and accountability explain a substantial portion of the variation in financial governance, while the remaining percentage is influenced by other factors not examined in this study. This study concludes that the proper implementation of accountability and transparency can enhance the effectiveness of education cost management and strengthen public trust in educational institutions. Therefore, it is necessary to improve human resource competencies, strengthen supervision systems, and provide adequate infrastructure to support the implementation of these principles.

Keywords: Transparency, Accountability, Education Cost Governance**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas tata kelola biaya pendidikan pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di MTs Muhammadiyah Muara Panas. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik dan staf administrasi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), serta uji koefisien determinasi (R Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola biaya pendidikan. Secara parsial, akuntabilitas memiliki pengaruh dengan nilai koefisien sebesar 0,104, sedangkan transparansi memiliki pengaruh yang lebih besar dengan koefisien sebesar 0,230. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola biaya pendidikan. Nilai koefisien determinasi sebesar 60,8% menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam tata kelola keuangan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan

akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya pendidikan serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Biaya Pendidikan Islam

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi aspek penting dalam sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan Islam itu sendiri, pengelolaan lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mencapai tujuan akademik, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan adalah tata kelola biaya pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel. John Dewey (2018) Pendidikan merupakan proses pengalaman yang terus-menerus dan bagian dari kehidupan itu sendiri, bukan hanya persiapan masa depan. Sedangkan Langeveld (2019) Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membimbing anak menuju kedewasaan. Manajemen keuangan sekolah yang efektif penting dalam memfasilitasi proses pendidikan yang berkelanjutan dan realisasi tujuan oleh sekolah. Dengan dimulainya transparansi informasi yang lebih besar dan persyaratan untuk tata kelola yang baik, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran sekolah, khususnya dalam alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, Muara Panas, yang berada di Muara Panas. Sekolah ini berdiri pada tahun 1994 dan menekankan pentingnya menjadi proses keuangan yang akuntabel dan transparan dalam lingkungan pendidikannya, yang merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Norsiva dan Suraijiah (2024), Pembentukan sistem keuangan pendidikan yang efisien, menjadi hal yang sangat penting sehingga dapat dipindahtangankan, dan dikelola dengan baik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Walaupun terjadi peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Serupa dengan penelitian menurut Baidowi dkk. (2024), Program pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan tentunya membutuhkan manajemen keuangan yang tepat Sumber daya manusia sekolah, yang meliputi kepala sekolah, guru, dan staf administrasi, memiliki peran penting dalam menjamin penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. Perencanaan anggaran merupakan tanggung jawab kepala sekolah, sedangkan guru dan staf administrasi terlibat dalam pemantauan dan penggunaan dana untuk biaya operasional dan perancangan program pendidikan.

Menurut Munawaroh dkk. (2025), transparansi merupakan prinsip tata kelola yang berlandaskan pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan publik secara mudah, terbuka, dan tepat waktu. Dalam konteks pengelolaan biaya pendidikan Islam, transparansi bertujuan membangun mekanisme akses informasi yang jelas mengenai kebijakan, program, serta penggunaan anggaran sekolah sehingga tercipta hubungan komunikasi yang lebih efektif antara lembaga pendidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Penerapan transparansi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah melalui penyediaan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, implementasi transparansi dalam pengelolaan anggaran keuangan pendidikan memerlukan beberapa aspek fundamental. Pertama, kebijakan anggaran harus disampaikan kepada publik sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami arah dan prioritas penggunaan dana pendidikan. Kedua, dokumen anggaran perlu disusun dalam format yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar dapat diakses oleh berbagai kalangan. Ketiga, lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya

publik. Keempat, setiap sekolah perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk mengajukan usulan program dan kebutuhan anggaran sesuai dengan kondisi serta prioritas masing-masing. Kelima, tersedianya sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat menjadi prasyarat penting untuk menjamin keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan biaya pendidikan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian informasi, tetapi juga menjadi mekanisme strategis dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Menurut Aristia (2024), transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Transparansi dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik karena memungkinkan seluruh aktivitas keuangan sekolah diawasi, dipantau, dan didokumentasikan secara terbuka oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, penerapan transparansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat integritas, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan.

Lebih lanjut, Aristia (2024) menjelaskan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan sekolah dapat diukur melalui beberapa kriteria utama. Pertama, keterbukaan informasi, yaitu tersedianya akses yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan aktivitas keuangan sekolah. Kedua, kemudahan akses informasi, yang menunjukkan bahwa informasi keuangan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ketiga, kejelasan dan kelengkapan laporan keuangan, yang ditandai dengan penyajian seluruh transaksi secara rinci, akurat, dan bebas dari informasi yang ambigu. Keempat, konsistensi pelaporan keuangan, yaitu penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala, misalnya setiap bulan atau semester, dengan standar pelaporan yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, keterlibatan pemangku kepentingan, yang diwujudkan melalui partisipasi aktif komite sekolah, guru, dan perwakilan peserta didik dalam proses penyusunan maupun evaluasi anggaran sekolah. Selain itu, hasil audit keuangan sekolah juga harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan pengawasan publik. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi, kualitas pelaporan, konsistensi administrasi, serta partisipasi pemangku kepentingan, maka semakin kuat pula implementasi transparansi dalam mendukung tata kelola keuangan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Sedangkan Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) agar memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ini didukung oleh Bovens (2007) Akuntabilitas merupakan hubungan sosial di mana seorang aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum tertentu, yang kemudian dapat memberikan penilaian serta konsekuensi atas tindakan tersebut. Mulgan (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan jawaban atau penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, terutama dalam konteks pelayanan publik.

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang mencerminkan adanya hubungan kepercayaan antara pihak yang memberikan amanah (*principal*) dan pihak yang menerima amanah (*agent*). Dalam hubungan tersebut, penerima amanah memiliki kewajiban untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan mandat. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas kinerja organisasi serta kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi

instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu proses yang terdiri atas tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah *informing*, yaitu penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, dan hasil yang telah dicapai kepada pihak yang berwenang. Tahap kedua adalah *debating* atau *evaluating*, yaitu proses penilaian, evaluasi, dan dialog terhadap informasi yang telah disampaikan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan tujuan maupun standar yang berlaku. Tahap terakhir adalah *judging*, yaitu pemberian penilaian akhir yang dapat berupa penghargaan, rekomendasi perbaikan, maupun konsekuensi atas kinerja yang telah dilakukan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar penyusunan laporan pertanggungjawaban, melainkan merupakan mekanisme pengawasan yang berlangsung secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya tata kelola organisasi yang berkualitas.

Dalam perspektif tata kelola organisasi modern, akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Organisasi yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya secara terbuka, objektif, dan terukur cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut akan memperkuat reputasi organisasi serta mendukung keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam membangun kredibilitas organisasi.

Lebih lanjut, Sinclair (1995) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan dinamis karena penerapannya dipengaruhi oleh karakteristik serta konteks organisasi. Akuntabilitas mencakup beberapa dimensi utama, yaitu dimensi politik yang menekankan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat layanan organisasi. Dimensi administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, serta mekanisme administrasi yang telah ditetapkan. Dimensi profesional menitikberatkan pada tanggung jawab individu maupun organisasi untuk menjalankan tugas sesuai kompetensi, kode etik, dan standar profesi yang berlaku. Sementara itu, dimensi moral menekankan pentingnya tanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai etika, integritas, kejujuran, serta norma sosial dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem akuntabilitas yang komprehensif sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Romzek dan Dubnick (1987) memperluas konsep akuntabilitas dengan mengelompokkannya ke dalam empat bentuk utama, yaitu *hierarchical accountability*, *legal accountability*, *professional accountability*, dan *political accountability*. *Hierarchical accountability* menekankan pertanggungjawaban kepada atasan berdasarkan struktur organisasi dan mekanisme pengawasan internal. *Legal accountability* mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap aktivitas organisasi. *Professional accountability* berorientasi pada tanggung jawab individu maupun organisasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi, standar profesi, dan kode etik yang berlaku. Sementara itu, *political accountability* menekankan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada masyarakat, pemerintah, serta para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat layanan publik. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal kepada pimpinan organisasi, tetapi juga bersifat horizontal kepada masyarakat dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kinerja organisasi.

Agar akuntabilitas dapat diterapkan secara efektif, diperlukan sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan prinsip utama yang tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas karena proses

pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila informasi disampaikan secara terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya transparansi, kualitas informasi yang disampaikan akan sulit diverifikasi sehingga mengurangi efektivitas proses evaluasi dan pengawasan. Selain transparansi, akuntabilitas juga didukung oleh prinsip responsibilitas, yaitu kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap keputusan dan tindakan organisasi dilakukan secara objektif serta memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip kepatuhan hukum mengharuskan setiap aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, keterbukaan informasi publik menjadi prinsip penting yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya organisasi. Penerapan seluruh prinsip tersebut secara terpadu akan memperkuat sistem akuntabilitas organisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas harus memenuhi dua unsur utama, yaitu *answerability* dan *enforcement*. *Answerability* mengacu pada kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sementara itu, *enforcement* menegaskan adanya mekanisme pemberian konsekuensi, baik berupa penghargaan maupun sanksi, apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menuntut kemampuan organisasi dalam menyampaikan informasi secara terbuka, tetapi juga kesiapan untuk menerima evaluasi serta konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil. Konsep ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme yang mengintegrasikan tanggung jawab, pengawasan, dan penegakan aturan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif.

Secara umum, tujuan utama akuntabilitas adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Mulgan (2000) menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Organisasi yang mampu menunjukkan pertanggungjawaban secara transparan dan konsisten akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mahmudi (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa fungsi strategis, yaitu sebagai fungsi pengendalian (*control*) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi, fungsi evaluasi (*evaluation*) untuk menilai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, fungsi pembelajaran (*learning*) sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan yang ditemukan selama proses evaluasi, serta fungsi legitimasi (*legitimacy*) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya bersifat reaktif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan, tetapi juga bersifat proaktif dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Implementasi akuntabilitas memberikan berbagai manfaat strategis bagi organisasi maupun masyarakat. Salah satu manfaat utama adalah meningkatnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya sehingga penggunaan anggaran, aset, dan berbagai aktivitas organisasi dapat diketahui serta diawasi oleh para pemangku kepentingan. Transparansi tersebut selanjutnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas organisasi. Selain itu, penerapan akuntabilitas juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional karena setiap individu terdorong untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja, prosedur operasional, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Adanya sistem pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang jelas akan meningkatkan disiplin kerja

sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Bovens (2007) juga menegaskan bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mengurangi risiko korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, serta berbagai bentuk inefisiensi organisasi.

Untuk memastikan efektivitas penerapan akuntabilitas, diperlukan indikator pengukuran yang mampu menggambarkan sejauh mana organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten. Menurut Mardiasmo (2018), indikator tersebut meliputi kejelasan struktur organisasi beserta pembagian tugas dan tanggung jawab, tersedianya informasi yang transparan dan mudah diakses, penyusunan laporan yang akurat serta disampaikan secara tepat waktu, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta pelaksanaan audit dan evaluasi secara berkala. Mahmudi (2015) menambahkan bahwa akuntabilitas juga dapat diukur melalui pencapaian kinerja organisasi, yaitu kemampuan organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian, pengukuran akuntabilitas tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan pelaporan, tetapi juga pada hasil nyata yang dihasilkan oleh organisasi.

Dalam sektor pendidikan, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam bidang pendidikan mencakup beberapa aspek utama, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkaitan dengan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan, akuntabilitas kinerja yang berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dan mutu layanan pendidikan, akuntabilitas administratif yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pendidikan, serta akuntabilitas publik yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas yang efektif akan mendorong peningkatan mutu pendidikan karena setiap kegiatan direncanakan secara sistematis, dilaksanakan sesuai prosedur, dievaluasi secara berkala, dan dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi akuntabilitas dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan informasi, lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan akuntabilitas. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem pertanggungjawaban dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas, serta optimalisasi mekanisme transparansi dan evaluasi agar tercipta tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif melalui pengukuran data secara numerik dan analisis statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan, kuesioner yang disebar kepada responden guna memperoleh data primer, serta dokumentasi sebagai pelengkap data yang berkaitan dengan objek penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang Metode pemilihan sampel ini biasanya digunakan dalam praktik, dimana elemen- elemen yang telah ditentukan sebelumnya tidak dimasukkan

kembali ke dalam proses pemilihan. Misalnya, sampel yang terbentuk terdiri dari elemen-elemen yang berbeda, sehingga setiap elemen populasi hanya memiliki kemampuan untuk dipilih satu kali.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Gambar 1: Rumus dan Penarikan Sampel

Sumber: Detik.com

Keterangan:

n = Ukuran Populasi

N = Ukuran Sampel

e = Kelonggaran pengambilan sampel

3. HASIL PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Persamaan regresi linear secara umum adalah:

Tabel 3 Hasil uji Regresi linier Berganda

Model	Unstandar dized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	16.777	1.709	–	12.045	0	–	–
Akuntabilitas	0.104	0.031	0.266	3.317	0.001	0.892	1.123
Transparansi	0.23	0.041	0.446	5.561	0	0.892	1.123

Dependent Variable: Tata Kelola Biaya Pendidikan

Sumber: Output SPSS Ver 26, diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel di atas bahwa nilai konstanta (nilai α) sebesar 16.777 dan untuk Akuntabilitas (nilai β) sebesar 0.104, sementara Transparansi (nilai β) sebesar 0.230. sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 16.777 + 0.104 X_1 + 0.230 X_2 + e$$

Dari persamaan linear berganda diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 17.776. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai tata kelola biaya pendidikan (Y) adalah 16.777.
2. Nilai Koefisien akuntabilitas (X1) memiliki nilai positif sebesar 0.604.
3. Nilai tersebut menunjukan bahwa akuntabilitas mengalami kenaikan 1 % maka tata kelola biaya pendidikan sebesar 0.104 atau 60.4%. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
4. Nilai Koefisien transparansi (X2) memiliki nilai positif sebesar 0.230. Nilai tersebut menunjukkan bahwa transparansi mengalami kenaikan 1% maka tata kelola biaya pendidikan keuangan 0.729 atau 72.9%. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien akuntabilitas yang dihasilkan sebesar 0.104 atau 10.4% dan nilai koefisien disiplin transparansi yang dihasilkan sebesar 0.230 atau 23.0% dengan demikian tanda positif yang dihasilkan artinya akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Uji Signifikansi (Uji t Parsial)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing- masing variabel penelitian. Uji-t ditunjukkan dengan nilai t–hitung dan nilai signifikansi yang menjadi output hasil pengolahan data. Berikut adalah hasil uji–t dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji T Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	16.775	1.509	–	11.046	0	–	–
Akuntabilitas	0.604	0.031	0.265	3.217	0.001	0.981	1.123
Transparansi	0.729	0.041	0.446	5.573	0	0.981	1.123

Dependent Variable: Tata Kelola Biaya Pendidikan

Uji t atau uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing- masing variabel penelitian tingkat signifikan sebesar 0,05. Uji signifikan menunjukkan diperoleh t.hitung $2217 \geq 1,650$ t.tabel . Hasil uji ini memberi makna bahwa jika t hitung lebih besar dari t.tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak. Ini memberi arti bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan . Sementara hasil uji t. Parsial transparansi menunjukkan t.hitung lebih besar dari t.tabel atau $(2.217 > 5.573)$ tingkat signifikansi

dengan 5% ini memberi makna bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap tata biaya pendidikan.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji-F atau uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh secara bersama (simultan) akuntabilitas dan transparansi terhadap tata kelola biaya pendidikan di MTs Muhammadiyah Muara Panas.

Tabel 5 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig
Rekresion	132.936	2	63.381	20.467	.0000 _b
Residual	223.432	115	2.084	2.054	
Total	356.368	117			

a. Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 20.467 dan nilai F Tabel sebesar 1.660 atau $f_{hitung} > f_{Tabel}$ (20.467 > 1.650). Hasil uji simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap tata kelola biaya pendidikan di MTs Muhammadiyah Muara Panas.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam hasil penelitian ditunjukkan dengan nilai R Square atau Adjusted R Square. Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi dapat digambarkan sebagai berikut ;

**Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Durbin-Watson
1	.580 _b	0.608	0.328	1.423	1.715

Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0.608 atau 60.8%. Ini memberi arti kontribusi akuntabilitas dan transparansi terhadap tata kelola keuangan sebesar 60,8% dan sisanya 39,2 persen disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Tata Kelola Biaya Pendidikan Islam: Studi MTs Muhammadiyah Muara Panas”, akuntabilitas terbukti memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola biaya pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas dalam suatu lembaga pendidikan, maka semakin efektif pula pengelolaan keuangan yang dilakukan. Secara empiris, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki koefisien sebesar 0,104 dengan arah positif. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas akan diikuti oleh peningkatan efektivitas tata kelola biaya pendidikan. Walaupun kontribusinya tidak sebesar variabel transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan.

Hasil ini diperkuat oleh uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai t-hitung akuntabilitas lebih besar dibandingkan t-tabel, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola biaya pendidikan dapat diterima. Artinya, secara statistik, akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya konsep teoritis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam praktik pengelolaan pendidikan. Selain itu, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tata kelola biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh transparansi agar dapat menghasilkan tata kelola yang optimal. Dengan kata lain, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Lebih lanjut, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,608 atau 60,8% menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam tata kelola biaya pendidikan. Sementara itu, sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, meskipun masih terdapat faktor lain yang juga berperan. Dalam konteks praktis, penerapan akuntabilitas di MTs Muhammadiyah Muara Panas tercermin dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam perencanaan anggaran, sedangkan guru dan staf administrasi berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya sistem akuntabilitas internal yang mendukung pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Selain itu, akuntabilitas juga diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan dan tepat waktu. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya laporan yang jelas dan terbuka, maka tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan akan meningkat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penerapan akuntabilitas. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat menghambat pelaksanaan akuntabilitas secara optimal. Selain itu, kondisi infrastruktur yang belum memadai juga menjadi tantangan dalam menyediakan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berwenang. Dalam praktiknya, akuntabilitas tidak hanya memerlukan sistem yang baik, tetapi juga didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dan budaya organisasi yang mendukung.

Bovens (2007) juga menekankan bahwa akuntabilitas melibatkan proses penyampaian informasi, evaluasi, dan pemberian konsekuensi. Dalam penelitian ini, proses tersebut terlihat dari adanya pelaporan keuangan, pengawasan penggunaan dana, serta evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah diterapkan secara sistematis, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola biaya pendidikan. Penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan sistem pengawasan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga pendidikan, khususnya MTs Muhammadiyah Muara Panas, terus meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan biaya pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan keuangan yang lebih sistematis, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan atau workshop terkait manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan. Lembaga pendidikan juga diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan internal agar penggunaan dana lebih efektif dan terhindar dari penyimpangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kepemimpinan, atau sistem pengendalian internal agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Dengan demikian, tata kelola biaya pendidikan yang baik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Strategi Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan Usai Efisiensi Anggaran: Systematic Literature Review. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 300-310.
- Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Strategi tata kelola pembiayaan pendidikan usai efisiensi anggaran: Systematic literature review. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 300–310.
- Alamanda 2020. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Laporan
- Aristia, Angger. 2024. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 2.
- Azwad, N. A., Masdar, N. A., Themba, O. S., & Naim, M. R. (2025). Strategi Inovasi di Era
- Baidowi, Ach. Maruf, Hafidz, Apriana. Dewi, Putri, Sari Nusantara. 2024. "Peran Pembiayaan Sekolah Dalam Memaksimalkan Mutu Pendidikan."
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada
- Dewi Ratnasari¹, Istianingsih Sastrodiharjo², Gilbert Rely³ Universitas Bhayangkara Digital: Meningkatkan Administrasi dan Kepatuhan Perpajakan di Dunia Digital.

- Fauzan, A., Utami, D. R., & Noviarita, H. (2025). Rekonstruksi konsep manajemen biaya dalam pendidikan Islam: Analisis efisiensi, transparansi, dan nilai syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845-860
- Fauzan, A., Utami, D. R., & Noviarita, H. (2025). Rekonstruksi konsep manajemen biaya dalam pendidikan Islam: Analisis efisiensi, transparansi, dan nilai syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845-860.
- Hafni, Diska Arliena, and Fitri Maulidah Rahmawati. 2022. "Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19." *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 5(2):93-104. doi: 10.17977/um027v5i22022p93.
- Iswahyudi, Subhan, Muhammad, Mohzana Sutarjo, Mohammad Subhan, Dumiyati, Wahyu Dwi Kurniawan, Edy Wihardjo, Bagus Aulia Iskandar, Fadhilatun Mahfudzah, Khasanah. 2025. *Dasar Manajemen Pendidikan*. Cendikia Mulia Mandiri. Jakarta Raya.dengan judul " Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Organisasi Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian (Jurnal Bisnis dan Ekonomi ISSN 3025-1664 Vol. 2 No. 03,2024,) *Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 19-25.
- Karmiyanti, Ni Kadek. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2(1):42-66. doi: 10.32795/hak.v2i1.1490. Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar (skripsi Univ.Bosowa Prog.Studi Administrasi Publik 2020)
- Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Munawaroh, Siti, Djupiansyah Ganie, Sayugo Adi Purwanto. 2025. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa." *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)* (2):60-69. doi:10.37338/jaab.v4i2.223.
- Norsiva, Suraijiah. 2024. "Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan Yang Transparan Dan Akuntabel Di Indonesia." *Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3(2):65-74.
- Nurafni, Kamsia, Fatimah Saguni, Siti Hasnah. 2022. "Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Multikultural* 1(1):44-68. doi:
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *Tadbiruna*, 3(1), 43-55.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *Tadbiruna*, 3(1), 43-55.

- Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: Forms and discourses. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 219–237
- Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: Forms and discourses. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 219–237.
- Sri Mulyani, D. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi Aplikasi Di Sektor Publik*. Bandung:Pers Unpad.
- Zuhroh, S. D. (2021). Implementasi E - Government:Dampaknya Pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*

